



MILIK PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Diterima :	18 JUN 2010
Inventarisasi :	144/rwsl/ttd.6/2010.
Klasifikasi :	363.23/Wah/10
Subjek :	Law Enforcement

TESIS

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PEMBUAT BATU BATA TANPA IZIN DI KABUPATEN BANTUL



L. WAHYU PRIYANTO

No. Mhs.: 07.1200/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2010



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : L. WAHYU PRIYANTO
Nomor Mahasiswa : 07.1200/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pembuat Batu Bata Tanpa Izin di Kabupaten Bantul

Nama Pembimbing

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum.

Hyronimus Rhiti, SH., LLM.

Tanggal

29/3/2010

Tanda Tangan

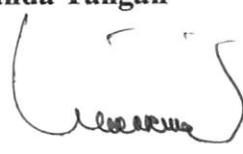
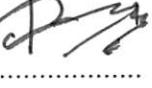
29/4/2010



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : L. WAHYU PRIYANTO
Nomor Mahasiswa : 07.1200/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pembuat Batu Bata Tanpa Izin di Kabupaten Bantul

Nama penguji	Tanggal	Tanda Tangan
(Ketua) Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum.	20/04/2010	
(Anggota) Hyronimus Rhiti, SH., LLM.	29/04/2010	
(Anggota) Dr. Paulinus Soge, SH., M.Hum.	20/04/2010	



Ketua Program Studi

B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum.

PERNYATAAN

Dengan ini saya, yang tersebut di bawah ini:

Nama : L. WAHYU PRIYANTO

Nomor Mahasiswa : 07.1200/PS/MIH

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pembuat Batu Bata Tanpa Izin di Kabupaten Bantul", adalah murni hasil dari analisis, pemikiran, dan penulisan saya sendiri serta saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh program kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat serupa, yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam tesis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya, dan saya sanggup mempertanggungjawabkan kebenarannya.

Yogyakarta, Maret 2010

Penulis Tesis

L. Wahyu Priyanto

INTISARI

Penelitian tesis yang berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pembuat Batu Bata Tanpa Izin di Kabupaten Bantul” ini, bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum, kendala yang muncul dalam upaya penegakan hukum, dan untuk mengetahui solusi yang tepat menanggulangi pelaku usaha pembuat batu bata tanpa izin di Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul dengan lokasi penelitian di 4 (empat) kecamatan yaitu Piyungan, Pleret, Sewon, dan Banguntapan.

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal, sedangkan metode pendekatan hukum yang digunakan adalah sosiologi hukum dan politik hukum. Data primer diperoleh melalui inventarisme peraturan perundang-undangan dan perda yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, sedangkan data sekunder merupakan pendapat narasumber yang diperoleh melalui wawancara, yang selanjutnya dianalogikan dengan keadaan masyarakat Kabupaten Bantul secara diskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) masyarakat belum memahami dampak dari penambangan tanah untuk batu bata; (ii) penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuat batu bata tanpa izin di Kabupaten Bantul belum efektif; (iii) perlu adanya PERDA baru yang mengatur tentang penambangan bahan galian golongan c khususnya memuat tentang penambangan tanah untuk batu bata; (iv) belum adanya kerjasama dan sinergi antara Dinas/Instansi terkait untuk menanggulangi permasalahan ini; (v) kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuat batu bata tanpa izin di Kabupaten Bantul yaitu: belum adanya Peraturan Daerah sebagai pedoman dan petunjuk penegakan hukum dalam permasalahan ini.

Kata-kata kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Pelaku Usaha, Batu Bata, dan Tanpa Izin.

ABSTRACT

The purpose thesis research of “The Effectiveness of Law Enforcement Against the Illegal Brick Makers in Bantul Regency” is to determine the effectiveness of law enforcement; problems were encountered in law enforcement, and to find out the solutions to handle the illegal bricks makers in Bantul regency. This research was conducted in Bantul regency with four sub districts area, which is Piyungan, Pleret, Sewon, and Banguntapan.

Type of thesis research is normative legal research with law synchronization vertically and horizontally, whereas the legal approach used are political and sociology of law. The primary data obtained through inventories of legislation and then synchronized by law of relevant that used and protection in nature. Secondary data obtained through date from people as sources obtained through interviews, than by used qualitative descriptive analysis do analogy in situation civil Bantul Regency.

The results showed that (i) people do not understand the impact of mining soil for bricks, (ii) law enforcement efforts against the agents of the illegal brick makers in Bantul regency has not effectively, (iii) there is need for new regional regulations governing about the extractive mining group c, especially mining land for brick, (iv) the lack of cooperation and synergy between government agencies / institutions to overcome this problem, (v) the constraints encountered in law enforcement efforts against the agents of illegal brick maker in Bantul regency are: the absence of local regulations and instructions as guidelines for law enforcement in this issue.

The Key Words: Effectiveness, law enforcement, agent, brick, and illegal.

KATA HANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih karena Anugerah dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pembuat Batu Bata Tanpa Izin di Kabupaten Bantul", yang disusun guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajad Sarjana S-2, Program Studi Magister Ilmu Hukum, konsentrasi Program Studi Hukum Bisnis.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik sewaktu dilapangan maupun pada waktu penulisan tesis. Secara khusus melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Direktur Program Pascasarjana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menulis tesis ini;
2. Bapak B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan penulisan tesis sampai selesai;
3. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum. selaku Pembimbing 1 (satu) dan Bapak Hyronimus Rhiti, SH., LLM. selaku Pembimbing 2 (dua), yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, memberikan sumbangsih pemikiran, memberikan kritik, saran, dorongan, dan motivasi kepada penulis;
4. Bapak Dr. Paulinus Soge, SH., M.Hum. selaku anggota pengudi tesis, yang telah memberikan pengarahan, kritik dan saran kepada penulis;
5. Bapak-Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang telah memberikan pembelajaran dan bimbingan kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Pemerintah Kabupaten Bantul, khususnya kepada Bapak Bupati Bantul atas izin yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan studi lanjutan S2, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perizinan, Badan Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, yang telah

menerima dan membantu penulis dalam pengumpulan data-data untuk penulisan tesis ini, serta Bapak Heri Subagyo, ST., (Kepala Seksi Pengawasan Dinas Sumber Daya Air), Bapak Ir. Edy Machmud Hidayat, (Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Dokumentasi Lingkungan Hidup), Ibu Dra. Endang Sugi Rahayu, (Kepala Bidang Pengawas Lingkungan Dinas Perizinan), atas pendapat dan keterangannya selaku narasumber dalam penulisan tesis ini.

7. Bapak Drs. Kandiawan NA, MM. selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang telah memberikan kesempatan dan motivasi untuk selalu belajar bagi penulis, dan rekan-rekan PNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul atas bantuan dan partisipasinya selama penulis menempuh pendidikan hingga selesai penulisan tesis ini;
8. Rekan-Rekan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah bersedia bertukar pemikiran dengan penulis dan seluruh keluarga besar Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan bantuan dan pelayanan terbaik kepada penulis.
9. Ibu, Mertua, Istri tercinta dan seluruh keluarga, ananda MG. Diani Luchasari dan L. Shelta Widyalucha, yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dukungan, dan cinta kepada penulis;
10. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan penulis satu-persatu sehingga penelitian tesis ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan.

Semoga terselesainya penelitian dan penyusunan tesis ini akan mendatangkan manfaat bagi pembaca dan mudah-mudahan mendatangkan ide-ide baru bagi penelitian yang sejenis.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan penulisan yang akan datang.

Yogyakarta, Maret 2010
Penulis,

L. Wahyu Priyanto

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan Tim Pengaji	iii
Pernyataan	iv
Intisari	v
Abstract	vi
Kata Hantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xiv
Daftar Bagan	xv
Daftar Gambar	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Keaslian Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Tujuan Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	14
BAB 11 KAJIAN PUSTAKA	16
A. Konsepsi Efektivitas Hukum	16

1. Pengertian	16
2. Efektivitas Hukum	18
B. Konsepsi Penegakan Hukum	20
1. Pengertian Penegakan Hukum	20
2. Penegakan Peraturan Daerah	26
C. Konsepsi Pelaku Usaha Pembuat Batu Bata Tanpa Izin	34
1. Pengertian Pelaku Usaha	34
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan UKL-UPL.	35
3. Pembuat Batu Bata	36
a) Pengertian Batu Bata	36
b) Pengertian Pembuat Batu Bata	38
3. Perizinan	39
4. Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara	45
D. Pemerintahan Kabupaten Bantul	48
1. Visi Pemerintah Kabupaten Bantul.....	48
2. Misi Kabupaten Bantul	50
3. Nilai-nilai	51
4. Letak Geografis Kabupaten Bantul	52
5. Pembagian Daerah Administratif	53
6. Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	54
7. Wewenang Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Terkait dengan Lingkungan Hidup	56

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian	62
B. Pendekatan Hukum	62
1. Sosiologi Hukum	62
2. Politik Hukum	64
C. Sumber Data	67
D. Instrumen Penelitian	70
E. Analisis Data	71
1. Analisis Data primer	71
2. Analisis Data sekunder	76
F. Langkah Akhir	76
G. Penarikan Kesimpulan	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Monografi Daerah Kabupaten Bantul	80
1. Gambaran Umum Kabupaten Bantul	80
2. Luas Lahan dan Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul ...	82
3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	85
a. Kecamatan Piyungan	85
b. Kecamatan Pleret	86
c. Kecamatan Sewon	87
d. Kecamatan Banguntapan	88
4. Penambang Galian Golongan C di Kabupaten Bantul	88
5. Dampak Penambang Galian Golongan C di Kabupaten Bantul .	94

6. Data Kuantitatif Pelaku Penambangan	96
B. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pembuat Batu Bata Tanpa Izin di Kabupaten Bantul	
1. Peraturan Perundang-Undangan	104
a. Sinkronisasi hukum secara vertikal	106
b. Sinkronisasi hukum secara horisontal	130
2. Fakta tentang Penegakan Hukum Penambang Galian Golongan C di Kabupaten Bantul.....	134
a. Tindakan yang bersifat persuasif	136
b. Tindakan yang bersifat non yustisi	136
c. Tindakan yang bersifat yustisi	137
3. Pendapat Nara Sumber	138
4. Pendapat Peneliti	161
C. Kendala yang Muncul dalam Penegakan Hukum	164
1. Bahan Hukum Primer	165
2. Fakta tentang Penegakan Hukum Penambang Galian Golongan C di Kabupaten Bantul.....	165
3. Pendapat Nara Sumber	166
4. Pendapat Peneliti	166
D. Solusi untuk Menangani Pelaku	
Usaha Pembuat Batu Bata Tanpa Izin di Kabupaten Bantul	167
1. Bahan Hukum Primer	168
2. Fakta tentang Penegakan Hukum Penambang Galian	

Golongan C di Kabupaten Bantul.....	168
3. Pendapat Nara Sumber	169
4. Pendapat Peneliti	169
BAB V PENUTUP	170
A. Kesimpulan Penelitian	170
1. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pembuat Batu Bata Tanpa Izin di Kabupaten Bantul	170
2. Kendala yang Muncul dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pembuat Batu Bata Tanpa Izin di Kabupaten Bantul	172
3. Solusi untuk Menangani Pelaku Usaha Pembuat Batu Bata Tanpa Izin di Kabupaten Bantul..	174
B. Saran Penulis Penelitian	175
Daftar Pustaka	177
Lampiran 1. Pedoman Wawancara	181
Lampiran 2. Daftar Isian Narasumber	184
Lampiran 3. Data Operasi Yustisi dan Artikel Koran	188
Lampiran 4. Peta Kecamatan	202
Lampiran 5. Peraturan Perundang-Undangan dan Perda Terkait dengan Penambangan di Kabupaten Bantul	206

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Pembagian Daerah Administratif Kabupaten Bantul	53
Tabel 2. Tabel Jumlah Desa, Pedukuhan, dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul	80
Tabel 3. Tabel Klasifikasi Penggunaan Lahan	82
Tabel 4. Tabel Perubahan Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian	83
Tabel 5. Tabel Luas Kerusakan Lahan Akibat Penambangan di Kabupaten Bantul	95
Tabel 6. Tabel Penambang Tanah dan Lokasi Penambangan untuk Pembuatan Batu Bata di Kabupaten Bantul	97
Tabel 7. Tabel Hirarkhi Peraturan Perundang-Undangan dan Perda ..	110
Tabel 9. Tabel Hasil Analisa Sinkronisai Hukum Secara Vertikal ...	113

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Bagan Analisis Data Penelitian	79
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gaambar 1. Gambar sawah sebelum penambangan	
Di Kecamatan Piyungan	92
Gambar 2. Gambar sawah setelah penambangan	
Di Kecamatan Piyungan	92
Gambar 3. Gambar penambangan pekarangan untuk pembuatan batu bata di Kecamatan Piyungan	93
Gambar 4. Gambar setelah penambangan tanah pekarangan untuk pembuatan batu bata di Kecamatan Piyungan	93